

**STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
(STUDI PADA BADAN PENGELOLA AIR MINUM (BPAM) DI DESA
KETAPANRAME KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO)**

Helmei Willy Amanda/08467047

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
(williamanda504@gmail.com)

Abstrak

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi yang berisi program indikasi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan pedesaan dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa strategi pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Ketapanrame, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes Tirto Tentrem, dan anggota BPAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan strategi terpadu dan menyeluruh meliputi tujuan, sasaran, lingkup, koordinasi, arus komunikasi, tempat prakarsa, dan indikator prestasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan BPAM dalam BUMDes dibutuhkan di Desa Ketapanrame selain untuk memberikan air bersih kepada seluruh warga, juga menambah pendapatan desa. Sistem pengelolaan BPAM tahun 2011 mengalami perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan sebelumnya (Hippam). Meskipun strategi pembangunan desa melalui BUMDes pada BPAM bisa dikatakan sudah optimal dalam pencapaiannya mensejahterakan masyarakat di Desa Ketapanrame, tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah-masalah terkait pengelolaan BUMDes. Untuk itu pengurus BUMDes Tirto Tentrem diharapkan mampu meningkatkan sistem pengelolaannya, sehingga dapat mempertahankan pencapaian tujuan BUMDes. Mengalokasikan dana BUMDes untuk menanggung biaya pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana desa. Mengoptimalkan peran Kepala Desa Ketapanrame sebagai penasehat, tidak hanya memantau perkembangan berdasarkan informasi dari pengawas.

Kata kunci : Strategi Pembangunan, BUMDes, BPAM, PADes

Abstract

Development strategy are the steps to be taken by all the organizations that contains an indicative program for realizing the vision, mission and goals set. Rural development is seen as an effort to accelerate rural development through the provision of infrastructure and regional economic development efforts to accelerate the effective and sturdy. This study describes and analyzes the rural development strategies in increase revenue villages through the village-owned enterprises (BUMDes) on the local water company (BPAM).

Research method used is descriptive qualitative. This research sources include village Ketapanrame, village secretary, chairman BUMDes Tirto Tentrem, and BPAM members. This study uses an integrated and comprehensive approach to strategy include goals, objectives, scope, coordination, and communication flows, where initiative, and achievement indicators. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation, while the data analysis was done with data collection, data reduction, data display, and conclusion.

The result showed BPAM Ketapanrame needed in the village than to provide clean water to all citizens, as well as increase the income of the village. BPAM management system in 2011 has improved and increased from the previous management (Hippam). Although rural development strategy through BUMDes on BPAM can be said is optimal in the achievement Ketapanrame village public welfare, will possibly arise issues related to the management BUMDes. To the board BUMDes Tirto Tentrem expected to improve its management the achievement of the objectives BUMDes. BUMDes allocate funds to bear the cost of education and health, and improvement of rural infrastructure. Optimize the role of the village head Ketapanrame as advisers, not only to monitor progress based on information from supervisors.

Keyword : Development Strategy, BUMDes, BPAM, PADes

Latar Belakang

Pemberlakuan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia menuju pada era keterbukaan, yang ditandai dengan terbukanya akses partisipasi masyarakat yang lebih luas. Otonomi daerah mengurangi beban pemerintah pusat maupun provinsi, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan sasaran-sasaran kebijakan yang lebih strategis, dan berdampak lebih luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kedewasaan ekonomi, serta politik masyarakat sebagai warga negara. Hal tersebut akan mempercepat perwujudan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional maupun regional, yang menjadi arahan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.

Otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2006). Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan sehingga dapat mengangkat derajat masyarakat desa. Untuk mencapai upaya tersebut dibutuhkan adanya strategi pembangunan. Menurut Sumpeno (2011) strategi pembangunan desa dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan desa yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu daerah yang memiliki BUMDes

yaitu Kabupaten Mojokerto. Keberadaan BUMDes di Kabupaten Mojokerto salah satunya terletak pada Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas dengan nama BUMDes “Tirto Tentrem”. BUMDes Tirto Tentrem memiliki empat unit usaha yakni Badan Pengelola Air minum (BPAM), Kebersihan Lingkungan, Hak Guna Terminal, dan Tandon Air.

Keberadaan BUMDes dalam menanungi unit BPAM diharapkan mampu menjawab permasalahan yang muncul dalam manajemen pengelolaan terdahulu. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui **Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.**

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan strategi pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes unit BPAM di Desa Ketapanrame Kecamatan trawas Kabupaten Mojokerto.

Desa

Desa menurut Widjaja (2003) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Widjaja (2003) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa,

desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Strategi Pembanguna Desa

Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh (Adisasmita, 2006). Tujuan pembangunan menurut Siagian (2005) yaitu untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang menjadi alasan utama diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sasaran (target) merupakan hasil yang diharapkan atas adanya suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (Sumpeno, 2011).

Adisasmita (2006) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdapat 7 pendekatan dalam menggambarkan pembangunan desa, yaitu : *pertama*, Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa. *Kedua*, Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. *Ketiga*, Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks. *Keempat*, Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun sementara di semua tingkatan, fungsi kebutuhan dan mekanismenya. *Kelima*, Arus komunikasi dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif. *Keenam*, Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus. *Ketujuh*, Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perdesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Bumdes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan menurut Badriyadi (2012) mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan.

Menurut Saragi (dalam Badriyadi, 2012) menyebutkan ada 4 tujuan pembentukan BUMDes antara lain *pertama*, pengembangan usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan. *Kedua*, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat. *Ketiga*, penyedia jaminan sosial. *Keempat*, penyedia layanan bagi masyarakat desa.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif, artinya dengan melakukan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen dengan mempertimbangkan adanya kenyataan jamak, dilakukan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, serta terdapat penyesuaian penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2010).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi penelitian dibutuhkan agar memperjelas tempat atau lokasi dimana situasi sosial tersebut akan diteliti.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah strategi pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) unit BPAM di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Strategi pembangunan desa menurut Adisasmita (2006) salah satunya adalah strategi terpadu dan menyeluruh, meliputi antara lain tujuan, sasaran, lingkup, koordinasi, arus komunikasi, tempat prakarsa, dan indikator prestasi.

Sumber Data

Suatu penelitian memerlukan data-data yang didapatkan dari sumber data lapangan yang telah dipilih yang kemudian diproses untuk dianalisis. Sumber data primer ini diperoleh dari para narasumber yang terlibat dalam BUMDes seperti aparatur pemerintah desa, ketua atau komisaris BUMDes, anggota BUMDes khususnya unit BPAM, serta masyarakat sebagai informan penguat atau tambahan yang merasakan atas adanya BUMDes yang berupa BPAM di Desa Ketapanrame.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tentang penelitian strategi pembangunan desa Ketapanrame melalui BUMDes unit BPAM menggunakan teknik triangulasi. Dimana peneliti akan menggabungkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010) mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai selesai, antara lain dengan analisis data sebagai berikut : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Pembahasan tentang Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Badan Pengelola Air Minum di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Pembangunan sebagai tindakan yang layak dalam peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan desa terdapat pada RPJMDes tahun 2012 s/d 2016. Diperkuat potensi desa yang berada di daerah pegunungan mengarahkan Pemerintah Desa menghasilkan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) sebagai strategi pembangunan desa.

Tujuan utama BPAM

BPAM merupakan unit usaha yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat yang bertujuan mensejahterakan warga Desa Ketapanrame. Dalam perkembangannya BPAM ditetapkan pendiriannya pada tahun 2004 guna memperbaiki pengelolaan terdahulu. Sebelum menjadi BPAM Tirto

Tentrem dulunya masyarakat menghimpun diri dan membentuk Hipam, meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu menyediakan air bersih untuk warga, namun sistem pengelolaannya masih sangat kurang. Kompleksitas permasalahan yang muncul antara lain ditunjukkan dari kurangnya peralatan yang digunakan untuk menyalurkan air bersih ke rumah warga serta kompleks vila dan hotel, sedangkan target yang ingin dicapai adalah semua wilayah di Desa Ketapanrame. Permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya modal yang dimiliki sehingga pengelolaannya tidak maksimal, maka dari itu dibutuhkan perbaikan dalam sistem pengelolaannya yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pencapaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan distribusi air dalam naungan Hipam tidak optimal. Tindakan pemerintah Desa Ketapanrame lebih lanjut dengan melakukan pengalihan pengelolaan Hipam menjadi BPAM dalam naungan BUMDes. Posisi BPAM dalam BUMDes adalah salah satu unit dari empat usaha lainnya, yang merupakan potensi usaha yang dimiliki Desa Ketapanrame.

Pengelolaan BPAM oleh BUMDes dibutuhkan masyarakat Desa Ketapanrame untuk menjawab berbagai permasalahan pada pengelolaan terdahulu, sehingga mampu mengoptimalkan hasil demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selama pengelolaan BPAM oleh BUMDes, pencapaian tujuan BPAM untuk mensejahterakan masyarakat desa lebih optimal. Hal tersebut disebutkan dan dibenarkan oleh ketua unit BPAM yaitu Bapak Ahmad Khusairi dan Kasi Pembangunan yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun Ketapanrame yaitu Bapak Kunarip. Meskipun data anggaran pendapatan tidak terlampir, namun Bapak Kunarip menyimpulkan dari data yang beliau pantau dan ketahui sudah menunjukkan perkembangan yang berarti. Hasil yang diperoleh dari pendapatan BPAM dialokasikan untuk menanggung biaya pendidikan dan juga kesehatan masyarakat Desa Ketapanrame, selain itu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Tujuan utama pembangunan menurut Adisasmita (2006) adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa. Dikaitkan dengan data perbandingan antara Hipam dan BPAM yang dijelaskan diatas, maka bisa dikatakan unsur pertumbuhan, persamaan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat Desa Ketapanrame sudah terealisasi secara optimal.

Sasaran BPAM

Implementasi strategi pembangunan Desa Ketapanrame melalui BPAM dalam pengelolaan BUMDes Tirto Tentrem ditujukan kepada kelompok sasaran yang ditetapkan. Pendekatan sasaran menurut Adisasmita (2006) yaitu membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. Kemampuan membangun bersama pemerintah dimiliki oleh seluruh komponen masyarakat.

Berdasarkan penetapan tujuan BPAM untuk mendistribusikan air bersih untuk seluruh wilayah Desa Ketapanrame dan juga berbagai daerah yang membutuhkan air bersih, maka kelompok sasaran BPAM merupakan seluruh rumah warga Desa Ketapanrame termasuk kompleks vila dan hotel. Batasan kelompok sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah desa yaitu seluruh wilayah Desa Ketapanrame, sedangkan untuk distribusi air ke daerah diluar desa menjadi tugas BPAM sebagai bentuk pengelolaan BUMDes. Secara keseluruhan target BPAM yang ditetapkan oleh pemerintah desa sudah tercapai, hal tersebut dibuktikan dengan sudah terdapat tandon air di setiap rumah warga di Desa Ketapanrame. Sedangkan BUMDes sendiri tidak memiliki batasan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah diluar Desa Ketapanrame, semakin banyak daerah yang membutuhkan air bersih semakin meningkat pula pendapatan dari BPAM tersebut.

Terkait data yang dijelaskan diatas berarti dalam implementasinya sudah mencapai target sasaran dan sudah sesuai dengan tujuan BPAM. Kemudian diperkuat dengan pendapat aparatur, anggota dan juga warga Desa Ketapanrame yang membenarkan bahwa sasaran BPAM sudah sesuai. Maka dengan kesesuaian target sasaran BPAM, dapat memaksimalkan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Lingkup Pengelolaan BPAM

Kompleksitas masyarakat Desa Ketapanrame merupakan lingkup yang turut mempengaruhi alur pengelolaan BPAM. Sistem pengelolaan BPAM harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan masyarakat Desa Ketapanrame. Ketika terdapat perubahan maka dibutuhkan sistem yang sesuai sehingga pencapaian hasil optimal. Namun pengelolaan BPAM tidak hanya bertumpu pada

kebutuhan internal melainkan kebutuhan eksternal juga memberi pengaruh terhadap perkembangan BPAM.

Lingkup pengelolaan BPAM yang bertumpu pada kebutuhan internal seperti sulitnya masyarakat desa, penduduk di kompleks, dan juga hotel sekitar dalam menyalurkan air untuk kebutuhan minum sudah mampu diatasi. Kebutuhan air bersih untuk warga Desa Ketapanrame sudah terpenuhi, tidak hanya pada rumah-rumah warga tetapi juga penduduk yang tinggal di kompleks vila dan juga hotel. Sedangkan pada kondisi eksternal dapat dilihat dari banyaknya daerah yang masih membutuhkan air bersih, kondisi tersebut berpotensi memberi pengaruh terhadap kelangsungan pengelolaan BPAM Tirto Tentrem untuk dapat mengembangkan usahanya.

Koordinasi Pengelolaan BPAM

Optimalisasi peran seluruh komponen yang terlibat dalam BPAM merupakan satu kesatuan dalam rantai koordinasi yang harus selaras. Koordinasi beranekaragam baik permanen maupun sementara disemua tingkatan, fungsi, kebutuhan dan mekanismenya (Adisasmita, 2006). Rantai koordinasi terbentuk atas adanya stuktur organisasi yang mengikat.

Secara perlahan peran atas tugas pokok dan fungsi yang dimiliki setiap pemangku jabatan diterapkan. Sejauh perkembangan sampai saat ini peran kepala Desa Ketapanrame sebagai penasehat belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena penasehat hanya sebatas memantau perkembangan berdasarkan informasi dari pengawas. Maka dibutuhkan kesadaran berperan lebih aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada struktural kepengurusan BUMDes Tirto Tentrem. Apabila seluruh anggota dapat berjalan sinergis dengan mekanisme yang ada, akan menghasilkan kolaborasi yang maksimal dan pencapaian yang maksimal pula.

Struktur organisasi yang terdapat pada BUMDes tidak terlihat adanya *overlapping*, semua memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi baik pengurus inti dengan anggota yang merupakan kelompok sasaran harus kooperatif dan terbuka. Pola koordinasi yang dilakukan cukup baik dan kooperatif. Hal itu ditunjukkan pada saat rapat yang dilakukan rutin oleh warga. Kelangsungan koordinasi yang berhasil

dihasilkan oleh arus komunikasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat dalam BPAM.

Arus Komunikasi

Kebutuhan interaksi dengan komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain baik secara formal maupun informal, horisontal maupun vertikal, berkesinambungan maupun sementara dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kepengurusan BPAM. Pendekatan komunikasi bertujuan melihat keefektifan komunikasi yang terjalin dalam pengelolaan BPAM. Pemilihan cara komunikasi yang tepat mempengaruhi keberhasilan suatu program termasuk pada BPAM.

Pemilihan cara komunikasi yang digunakan pengurus BPAM yakni komunikasi formal dan informal. Komunikasi yang digunakan pada sosialisasi program terhadap masyarakat desa lebih menekankan pada komunikasi secara formal. Sedangkan untuk komunikasi secara informal dilakukan dengan persuasif, yaitu dengan cara bersosialisasi untuk menarik minat masyarakat di daerah lain yang membutuhkan air bersih.

Komunikasi dengan cara diatas terbukti efektif karena masyarakat dirasa lebih mudah menerima adanya program BPAM. Sedangkan arus komunikasi pasca sosialisasi tetap dijalankan secara perduasif dan edukatif. Edukatif dengan adanya pembekalan dalam rangka pemberian pengetahuan pengelolaan BPAM. Maka arus komunikasi di dalam pengelolaan BPAM berhasil berjalan secara efektif.

Tempat Prakarsa

Peran pemerintah Desa Ketapanrame dalam keterlibatannya sebagai fasilitator serta evaluator pengelolaan BPAM. Fasilitator dimaksudkan menyediakan baik meteril maupun non materiil yang dibutuhkan dalam implementasi BPAM. Sumber materiil yang dibutuhkan anantara lain tempat prakarsa. Tempat prakarsa merupakan tempat dimana seluruh anggota dapat berkumpul dan saling bertukar informasi. Pemerintah Desa Ketapanrame memfasilitasi tempat prakarsa anggota BPAM di balai desa dan kantor BPAM yang terletak di Desa Ketapanrame. Balai desa digunakan rutin sebagai tempat prakarsa yang diadakan setiap bulan dengan maksimal. Penentuan tempat prakarsa BPAM di balai desa sangat efektif dan efisien karena letak balai desa cukup besar sehingga mudah dijangkau anggota. Kuota tampung

balai desa cukup besar sehingga memungkinkan berkumpulnya anggota BPAM secara keseluruhan. Selain itu pemerintah desa Ketapanrame dapat memantau perkembangan BPAM melalui pertemuan rutin tersebut. Maka penentuan tempat prakarsa di balai desa merupakan keputusan yang tepat.

Selain balai desa sebagai tempat pertemuan, BPAM memiliki kantor operasional sendiri. Kantor BPAM digunakan sebagai tempat kepengurusan anggota baik pendaftaran, pengelolaan rutin, maupun pembayaran. Maka pengurus BPAM dituntut optimalitas peran dalam menjalankan kewajiban untuk mengelola BPAM termasuk kantor operasionalnya. Dengan mengoptimalkan peran dan juga menjalankan kewajiban, sehingga pengelolaan BPAM menjadi lebih maksimal.

Indikator Prestasi

Kesesuaian pencapaian prestasi dengan tujuan BPAM yakni mensejahterakan masyarakat Desa Ketapanrame. Tujuan tersebut sesuai dengan prestasi atas perbaikan sistem sehingga memperoleh dampak yang cukup baik. Dampak yang dihasilkan yaitu tersedianya peralatan yang dibutuhkan oleh BPAM dalam mendistribusikan air kepada seluruh warga di wilayah Desa Ketapanrame, perbaikan sistem tersebut sesuai dan mampu mengurangi permasalahan lambat nya pengelolaan BPAM.

Perkembangan *partnership* antara pengelola BPAM dengan perusahaan properti memberikan dampak positif pada pengelolaannya. Implikasi dari kemitraan yang terjalin dapat mengurangi beban para pengurus BPAM. Dengan adanya hubungan kemitraan dengan pihak luar, sehingga BPAM memiliki modal lebih dalam mengelola BUMDes. Dan hal tersebut juga berdampak terhadap meningkatnya pendapatan yang dihasilkan BPAM.

Hubungan kemitraan baru dimulai saat BUMDes unit BPAM dibentuk. Hubungan yang terjadi merupakan perkembangan positif atas pengelolaan BPAM. Lebih lanjut dibutuhkan penjelasan perjajian yang lebih rinci dan sistematis. Sehingga keberlangsungan kemitraan dapat dikaji dari segi manfaat dan keseuaiannya dengan tujuan dan kebutuhan anggota BPAM di Desa Ketapanrame.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait strategi pembangunan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada unit Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan sebagai strategi pembangunan desa berjalan baik.

Pengelolaan BPAM dibawah naungan BUMDes Tirto Tentrem berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan terdahulu (Hipam). Perbaikan diawali dari tujuan, penetapan sasaran yang sesuai, menyesuaikan lingkup masyarakat, adanya koordinasi yang kondusif, arus komunikasi persuasif yang akurat, terjadinya tempat prakarsa yang memadai, dan tercapainya indikator prestasi. Sudah terdapat banyak upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan BPAM dibawah naungan BUMDes dibandingkan dengan pengelolaan terdahulu, dan pencapaian hasilnya bisa dikatakan sudah optimal. Hal tersebut sesuai dengan visi yang dimiliki Desa Ketapanrame dalam mensejahterakan masyarakat desa. Dan BPAM merupakan program yang dibutuhkan masyarakat Desa Ketapanrame khususnya yang menjadi sasaran dalam membantu memberikan modal usaha.

Saran

Meskipun pencapaian BUMDes di Desa Ketapanrame ini sudah bisa dikatakan optimal, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul permasalahan yang nantinya akan menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Untuk itu peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : *Pertama*, Pengurus BUMDes unit BPAM Tirto Tentrem diharapkan mampu meningkatkan sistem pengelolaannya, sehingga dapat mempertahankan pencapaian BUMDes yang sesuai dengan tujuan. *Kedua*, Mengalokasikan dana BUMDes untuk menanggung biaya pendidikan dan juga kesehatan. Selain itu untuk perbaikan sarana dan prasarana desa. *Ketiga*, Mengoptimalkan peran Kepala Desa Ketapanrame sebagai penasehat, tidak hanya memantau perkembangan berdasarkan informasi dari pengawas.

Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosida Karya.

Raharjo. 2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Administrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.

Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Bumi Aksara

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa”*. The World Bank. Aceh

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh : Read

Wastiono, Sadu dan Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Bdan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2012-2016

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa

Badriyadi. 2012. Jurnal. *Pengelolaan Dana Pinjaman di Desa Sungai Raya*. Pontianak

BUMDes Ketapanrame. 12 April 2012. <http://bumdes-ketapanrame.blogspot.com/2012/04/assalamualaikum-wr.html>

Gunawan, Ketut. 2011. Jurnal. *Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi*. Singaraja